LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025
Tahun Audited

Kantor Kementerian Agama Kota Palembang

MTs Negeri 2 Kota Palembang(309360)

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Mts Negeri 2 Kota Palembang adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Agama yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan MTS Negeri 2 Kota Palembang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Mts Negeri 2 Kota Palembang. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Palembang, 30 April 2026
Kepala,

KEMENTERIAN AGAMA
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2
KOTA PALEMBANG
REPUBLIK INDONESIA

M. A Fajar, S.Pd, M.Pd

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan Atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	18
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	23
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	26
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	31
F. Pengungkapan Penting Lainnya	34
VI. Lampiran dan Daftar	35

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALEMBANG
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 KOTA PALEMBANG
TERAKREDITASI A (UNGGUL)
Jalan Inspektur Marzuki KM 4,5 Kel. Siring Agung Kec. Ilir Barat I Kota Palembang 30138
Situs Web : www.mtsn2palembang.sch.id Email : mtsn2palembang@kemenag.go.id
NSM : 121116710002 Telepon/Fax : (0711) 410139 NPSN : 10648782

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Mts Negeri 2 Kota Palembang (309360) yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 Periode 31 Desember 2025 Audited sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Palembang, 11 Februari 2026

Kepala,

KEMENTERIAN AGAMA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI KOTA PALEMBANG REPUBLIK INDONESIA

M. A Fajar, S.Pd, M.Pd

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Mts Negeri 2 Kota Palembang Tahun 2024 Periode 31 Desember 2025 Tahunan Audited ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2024 Periode 31 Desember 2025 Tahunan Audited adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp2.580.000 atau mencapai 0 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2025 Periode 31 Desember 2025 Tahunan Audited adalah sebesar Rp1.452.831.632 atau mencapai 98.02 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp1.482.162.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025.

Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp8.381.250.826 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp4.493.000; Aset Tetap (neto) sebesar Rp8.376.757.826; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0 dan Rp8.381.250.826.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,

sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp 1.659.801.231 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp (1.659.801.231). Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa masing-masing surplus/defisit sebesar Rp2.580.000 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp (1.657.221.231).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp8.588.240.425 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(1.657.221.231) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp1.450.251.632 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp8.381.250.826.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

MTS NEGERI 2 KOTA PALEMBANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2025		% thd Angg	TA 2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	2,580,000	0.00	-
JUMLAH PENDAPATAN		**-**	**2,580,000**	**0.00**	**-**
BELANJA	**B.2.**				
Belanja Pegawai	B.3	-	-	0.00	-
Belanja Barang	B.4	1,332,297,000	1,303,047,282	97.80	1,286,027,508
Belanja Modal	B.5	149,865,000	149,784,350	99.95	112,938,150
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	0.00	-
JUMLAH BELANJA		**1,482,162,000**	**1,452,831,632**	**98.02**	**1,398,965,658**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

MTS NEGERI 2 KOTA PALEMBANG
NERACA
PER 31 Desember 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Persediaan	C.2	4,493,000	334,000
Jumlah Aset Lancar		**4,493,000**	**334,000**
ASET TETAP			
Tanah	C.3	-	-
Peralatan dan Mesin	C.4	2,233,539,900	2,128,755,550
Gedung dan Bangunan	C.5	10,480,838,800	10,480,838,800
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.6	153,984,000	153,984,000
Aset Tetap Lainnya	C.7	741,033,164	696,033,164
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.8	(5,232,638,038)	(4,871,725,089)
Jumlah Aset Tetap		**8,376,757,826**	**8,587,886,425**
JUMLAH ASET		**8,381,250,826**	**8,588,220,425**
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.9	-	-
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.10	-	
Uang Muka dari KPPN	C.11	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		**-**	**-**
JUMLAH KEWAJIBAN		**-**	**-**
EKUITAS			**-**
Ekuitas	C.12	8,381,250,826	8,588,220,425
JUMLAH EKUITAS		**8,381,250,826**	**8,588,220,425**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**8,381,250,826**	**8,588,220,425**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

MTS NEGERI 2 KOTA PALEMBANG
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2025 DAN 2024

(*Dalam Rupiah*)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		**-**	**-**
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	-	-
Beban Persediaan	D.3	20,708,500	19,165,222
Beban Barang dan Jasa	D.4	1,062,968,549	1,128,511,326
Beban Pemeliharaan	D.5	189,661,233	92,596,960
Beban Perjalanan Dinas	D.6	25,550,000	45,420,000
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	360,912,949	351,493,209
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
Beban Lain-lain	D.11	-	-
JUMLAH BEBAN		**1,659,801,231**	**1,637,186,717**
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		**(1,659,801,231)**	**(1,637,186,717)**
KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	D.12		
Pendapatan dari kegiatan Non Operasional Lainnya		2,580,000	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Jumlah Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		**2,580,000**	**-**
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		**2,580,000**	**-**
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		**(1,657,221,231)**	**(1,637,186,717)**
POS LUAR BIASA	D.13		
Beban Luar Biasa		-	-
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		(1,657,221,231)	(1,637,186,717)
SURPLUS/DEFISIT LO		**(1,657,221,231)**	**(1,637,186,717)**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

MTS NEGERI 2 KOTA PALEMBANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	**8,588,220,425**	**8,914,807,596**
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	**(1,657,221,231)**	**(1,637,186,717)**
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	**-**	**(88,366,112)**
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.3.5	-	(88,366,112)
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
JUMLAH		**-**	**(88,366,112)**
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	1,450,251,632	1,398,965,658
EKUITAS AKHIR	E.5	**8,381,250,826**	**8,588,220,425**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

12/31/2024

INFORMASI KEUANGAN TERTENTU DAN INFORMASI PENTING LAINNYA

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis MTS Negeri 2 Kota Palembang

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

MTS Negeri 2 Kota Palembang yang berkedudukan di Jalan Inspektur Marzuki Km 4,5 Kelurahan Siring Agung Kec. Ilir Barat 1 Kota Palembang. Entitas didirikan dalam rangka membantu mencapai tugas dan fungsi Kementerian Agama RI sebagai Kementerian yang tersentralisasi secara vertikal. Kementerian Agama mempunyai nilai strategis dalam penyelenggaraan pemerintah.

MTS Negeri 2 Kota Palembang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta mencapai tujuan yang diembannya maka melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan agama khususnya di Kota Lubuklinggau. Untuk mewujudkan tujuan di atas MTS Negeri 2 Kota Palembang berkomitmen dengan visi *"**Mewujudkan Generasi Qurani, Scientist, Berakhlak dan Berwawasan Lingkungan.**"* Berdasarkan Visi di atas, maka Misi MTS Negeri 2 Kota Palembang yang mengacu kepada misi Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut :

- Mewujudkan pelayanan dan pelaksanaan proses pendidikan dasar yang berkualitas dengan menerapkan kurikulum MTSN 2 Palembang yang berstandar nasional yang dikemas dalam kurikulum qurani berbasis Al-Qur'an, berkarakter dan berwawasan lingkungan serta memiliki ciri khusus dalam pengembangan potensi imtaq;
- Melaksanakan proses pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan diserati sikap prilaku bersahabat dan keteladanan;
- Melaksanakan pendidikan, pengajaran dan pembelajaran yang berkualitas berbasis ICT dibidang sains dan teknologi melalui kajian dan riset yang mampu berinovasi dan berkompetisi pada pengembangan IMTAQ dan IPTEK dalam persaingan global;
- Mewujudkan peningkatan kemampuan penguasaan Bahasa Inggris dan Bahasa Arab menjadi komunikasi di MTS Negeri 2 Kota Palembang;

- Mewujudkan lulusan yang unggul dan kompetitif melalui peningkatan prestasi akademik dan non akademik;
- Mewujudkan manajemen mutu yang lebih mendorong pada prestasi dan kualitas kerja yang kompetitif serta intensif dan logis bagi warga MTS Negeri 2 Kota Palembang;
- Mewujudkan kemitraan dengan stakeholder guna meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan di MTS Negeri 2 Kota Palembang;
- Mewujudkan warga madrasah yang mampu mengelola, mengendalikan dan melestarikan lingkungan yang sehat, bersih, aman, dan nyaman agar belajar menjadi aktif dan efektif;
- Mewujudkan semua warga MTS Negeri 2 Kota Palembang yang sopan santun, ramah tamah, bersahabat, bekerjasama, senyum, sapa, salam, jujur, tolong-menolong, bertanggung jawab, gotong royong dan disiplin.

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Periode 31 Desember 2025 Tahunan Audited Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh MTS Negeri 2 Kota Palembang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

MTS Negeri 2 Kota Palembang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan MTS Negeri 2 Kota Palembang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Periode 31 Desember 2025 Tahunan Audited Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi

yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI yang merupakan entitas pelaporan dari MTS Negeri 2 Kota Palembang. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan MTS Negeri 2 Kota Palembang adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:
  a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat

peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
  b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar,

pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  a. Tanah
  b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang

yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset

kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	**Masa Manfaat (tahun)**
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

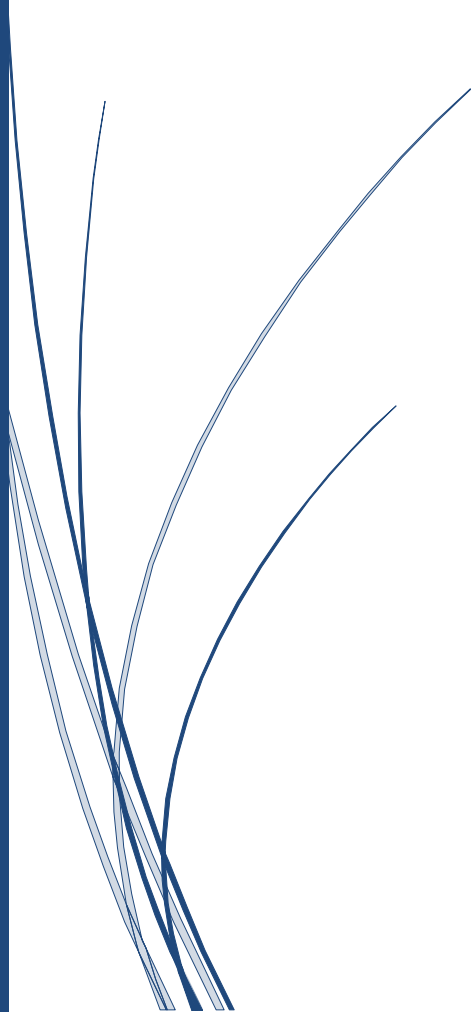
Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

12/31/2024

CALK REALISASI ANGGARAN



B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, *MTs Negeri 2 Kota Palembang* telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal yakni revisi ke 7 tanggal 19 Desember 2025. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan dan Penyesuaian Rencana Penarikan Dana Pada Halaman III DIPA. Tidak terdapat perubahan pada jumlah anggaran setelah direvisi:

Uraian	2025	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan PNBP	0	-
Pendapatan Lain-lain	0	-
Jumlah Pendapatan	**-**	**-**
Belanja		
Belanja Pegawai	0	0
Belanja Barang	1,396,268,000	1,332,297,000
Belanja Modal	85,894,000	149,865,000
Belanja Bantuan Sosial	0	-
Jumlah Belanja	**1,482,162,000**	**1,482,162,000**

Realisasi Pendapatan Rp2.580.000

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.580.000 atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2025		
	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Jasa	0	0	0,00
Pendapatan Lain-Lain	0	2.580.000	0,00
Jumlah	**0**	**2.580.000**	**0,00**

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNBP	2,580,000	-	#DIV/0!
Jumlah	**2,580,000**	**-**	**#DIV/0!**

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 25.80.000 disebabkan adanya Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu atas temuan hasil pengawasan BPKP.

Realisasi Belanja Negara Rp1.452.831.632

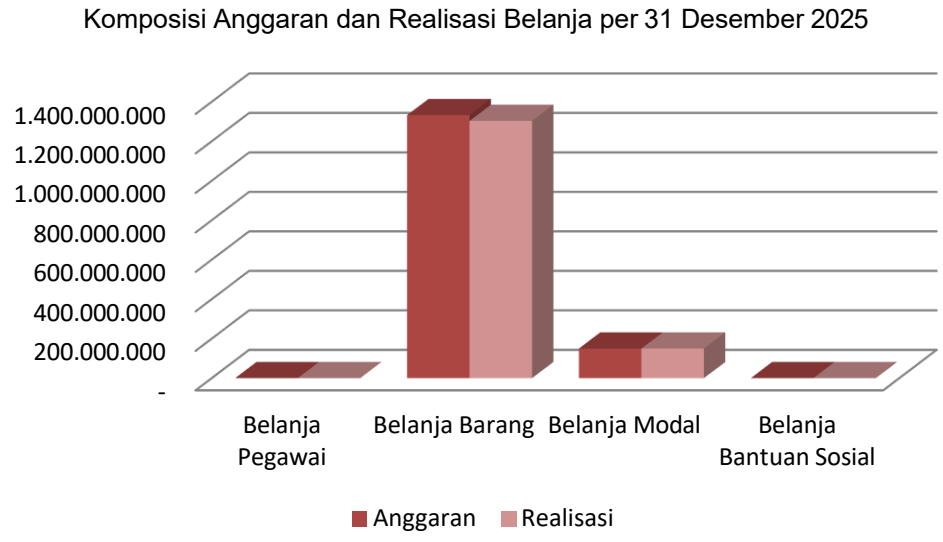
B.2. Belanja

Realisasi Belanja MTS Negeri 2 Palembang pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.452.831.632 atau 98.02 persen dari anggaran belanja sebesar Rp1.482.162.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2025

URAIAN	2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Anggaran
Belanja Pegawai	0	-	-
Belanja Barang	1,332,297,000	1,303,047,282	97.80
Belanja Modal	149,865,000	149,784,350	99.95
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Total Belanja Kotor	**1,482,162,000**	**1,452,831,632**	**98.02**
Pengembalian Belanja		-	
Jumlah	**1,482,162,000**	**1,452,831,632**	**98.02**

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Dibandingkan dengan TA 2024, Realisasi Belanja TA 2025 mengalami kenaikan sebesar **3.85** persen dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

- Adanya Kenaikan Anggaran Belanja Modal Pada TA 2025
- Adanya Kenaikan Anggaran Belanja Barang Pada TA 2025

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI		NAIK (TURUN) %
	TA 2025	TA 2024	
Belanja Pegawai	-	-	#DIV/0!
Belanja Barang	1,303,047,282	1,286,027,508	1.32
Belanja Modal	149,784,350	112,938,150	32.63
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	**1,452,831,632**	**1,398,965,658**	**3.85**

Realisasi Belanja Pegawai Rp0

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai MTS Negeri 2 Palembang pada TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja pegawai TA 2025 tidak mengalami penurunan ataupun kenaikan dari TA 2024. Hal ini disebabkan karena Anggaran Belanja Pegawai Sudah Dimigrasikan ke Anggaran Sekretariat Jenderal Kantor Kementerian Agama Kota Palembang.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	0	0	#DIV/0!
Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	0	0	-
Belanja Lembur	-	-	#DIV/0!
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	-	-	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	**0**	**0**	#DIV/0!
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-
Jumlah Belanja	**0**	**0**	**#DIV/0!**

Belanja Barang Rp1.303.047.282

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang MTS Negeri 2 Palembang pada TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.303.047.282 dan Rp1.286.027.508. Realisasi Belanja Barang TA 2025 mengalami kenaikan sebesar **1.32** persen dari TA 2024. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan realisasi belanja barang operasional, belanja pemeliharaan, Belanja Barang Persediaan dan Belanja Perjalanan Dinas untuk TA 2025.

Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2025 dan 2024

URAIAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	1,015,699,549	1,106,337,326	(8.19)
Belanja Barang Non Operasional	17,825,000	17,479,000	-
Belanja Jasa	33,600,000	4,695,000	-
Belanja Pemeliharaan	189,664,233	92,596,960	104.83
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	25,550,000	45,420,000	100.00
Belanja Barang persediaan	20,708,500	19,499,222	6.20
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	**1,303,047,282**	**1,286,027,508**	**1.32**
Pengembalian Belanja	-	-	
Jumlah Belanja	**1,303,047,282**	**1,286,027,508**	**1.32**

Belanja Modal Rp149.784.350

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal MTS Negeri 2 Palembang TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp149.784.350 dan Rp112.941.000 Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2025 mengalami kenaikan sebesar **32.63** persen dibandingkan TA 2024 karena adanya kenaikan anggaran belanja modal Peralatan dan Mesin berupa pembelian 4 Buah Lemari Penyimpanan, 1 Set Kursi Tamu, 1 Buah Kursi Kerja Kantor,2 Set Sofa Tamu, 4 Buah AC, 1 Set Sound System, 1 Set Kamera, 1 Buah Finger Print, 4 Unit Printer, dan 1 Paket Buku Mata Pelajaran.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	TA 2025	TA 2024	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	104,784,350	72,940,150	43.66
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	0	-
Belanja Modal Lainnya	45,000,000	39,998,000	12.51
Jumlah Belanja Kotor	**149,784,350**	**112,938,150**	**32.63**
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0.00
Jumlah Belanja Bersih	**149,784,350**	**112,938,150**	**32.63**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp104.784.350

B.2.3.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin MTS Negeri 2 Palembang TA 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp104.784.350 dan Rp72.940.150 Realisasi belanja modal peralatan dan mesin untuk TA 2025 mengalami kenaikan sebesar **30** persen dari TA 2024 karena kenaikan anggaran belanja modal untuk TA 2025.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Laptop	0	30,000,000	#DIV/0!
Printer	10,959,000	7,000,000	36%
Kursi Kayu	12,765,000	0	100%
AC	19,331,550	4,372,290	77%
Sound System	13,098,000	0	100%
Lemari Penyimpan	11,764,500	6,572,860	44%
Meja Kerja Kayu	0	20,000,000	#DIV/0!
Kursi Besi/ Metal	1,995,000	0	100%
UPS	0	4,995,000	#DIV/0!
Kamera	15,975,000	0	100%
Finger Print	1,691,300	0	100%
Sofa	17,205,000	0	100%
Jumlah Belanja Kotor	**104,784,350**	**72,940,150**	30%
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	**104,784,350**	**72,940,150**	**30%**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp0

B.2.3.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan TA 20243 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak ada anggaran belanja modal gedung dan bangunan untuk TA 2025 ini.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A 2024	NAIK (TURUN) %
Ruang Kelas Baru	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	**0**	0	0.00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	**0**	**0**	0.00

Belanja Modal Lainnya Rp45.000.000

B.2.3.3 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp45.000.000 dan Rp39.998.000. Realisasi Belanja Modal TA 2025 merupakan pengadaan buku mata pelajaran (MTs) umum dan keagamaan di MTS Negeri 2 Palembang.

Belanja Bantuan Sosial Rp0

B.2.4 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial MTS Negeri 2 Palembang pada TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak ada anggaran belanja bantuan sosial untuk tahun 2025.

12/31/2024

CALK NERACA

PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp0

C.1 Kas Di Bendahara Pengeluaran

Nilai Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca.

Persediaan Rp4.493.000

C.2 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp4.493.000 dan Rp334.000.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Persediaan	TH 2025	TH 2024
Barang Konsumsi	4,493,000	334,000
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	**4,493,000**	**334,000**

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tanah

Rp0

C.3 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki oleh MTS Negeri 2 Palembang per 31 Desember 2025 dan 20243 adalah Rp0 dan Rp0. MTS Negeri 2 Palembang tidak mempunyai asset tanah karena tanah MTS Negeri 2 Palembang merupakan pinjam pakai dari tanah MAN 3 Palembang. Aset berupa tanah tersebut terletak di Jalan Inspektur Marzuki Km 4.5 Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang.

Peralatan dan Mesin

Rp 2.233.539.900

C.4 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp2.233.539.900 dan Rp2.128.755.550 . Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	**2,128,755,500**
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	0
Pembelian	104,784,350
Hibah Barang	0
Mutasi kurang:	0
Koreksi Nilai Aset Tetap	-
Penghentian dari penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2025	**2,233,539,850**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	-2,018,496,614
Nilai Buku per 31 Desember 2025	**215,043,236**

Terdapat Pembelian Peralatan dan Mesin TA 2025 berupa pembelian 4 Buah Lemari Penyimpanan, 1 Set Kursi Tamu, 1 Buah Kursi Kerja Kantor,2 Set Sofa Tamu, 4 Buah AC, 1 Set Sound System, 1 Set Kamera, 1 Buah Finger Print, dan 4 Unit Printer.

Gedung dan Bangunan

Rp10.480.838.800

C.5 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp10.480.838.800 dan Rp10.480.838.800. Tidak ada mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

	4	**10,480,838,800**
Mutasi tambah:		
Transfer Masuk		-
Pembangunan gedung		-
Revaluasi Aset		-
Koreksi pencatatan		-
Mutasi kurang:		
Koreksi pencatatan		-
Saldo per 31 Desember 2025		**10,480,838,800**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025		(2,660,627,470)
Nilai Buku per 31 Desember 2025		**7,820,211,330**

Jalan, Irigasi dan Jaringan

Rp153.984.000

C.6 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp153.984.000 dan Rp153.984.000. Saldo tersebut terdiri dari Jalan Khusus dan Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air.

Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2024	**153,984,000**
Mutasi tambah:	
Transfer masuk	-
Pembelian	-
Mutasi kurang:	
Koreksi pencatatan	-
Saldo per 31 Desember 2025	**153,984,000**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(41,962,005)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	**112,021,995**

Aset Tetap Lainnya Rp741.033.164

C.7 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp741.033.164 dan Rp696.033.164

Mutasi transaksi terhadap Aset Lainnya per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2024	**696,033,164**
Mutasi tambah:	
Transfer masuk	-
Pembelian	45,000,000
Mutasi kurang:	
Koreksi pencatatan	-
Saldo per 31 Desember 2025	**741,033,164**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(122,541,000)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	**618,492,164**

Transaksi tambah :

- Pembelian buku pelajaran (MTS) umum dan keagamaan di MTS Negeri 2 Palembang.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp(5.232.638.038)

C.8 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp(5.232.638.038) dan Rp(4.871.725.089)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	2,233,539,900	2,084,683,594	148,856,306
2	Gedung dan Bangunan	10,480,838,800	2,949,758,506	7,531,080,294
3	Jalan dan Jembatan	28,098,000	28,098,000	0
4	Irigasi	125,886,000	47,556,938	78,329,062
5	Aset Tetap Lainnya	741,033,164	122,541,000	618,492,164
Akumulasi Penyusutan		**13,609,395,864**	**5,232,638,038**	**8,376,757,826**

Utang kepada Pihak Ketiga

Rp0

C.9 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Uang Muka dari KPPN

C.10 Uang Muka dari KPPN

Rp0

Nilai Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan jumlah kas di Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang digunakan untuk membayar belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.

Ekuitas

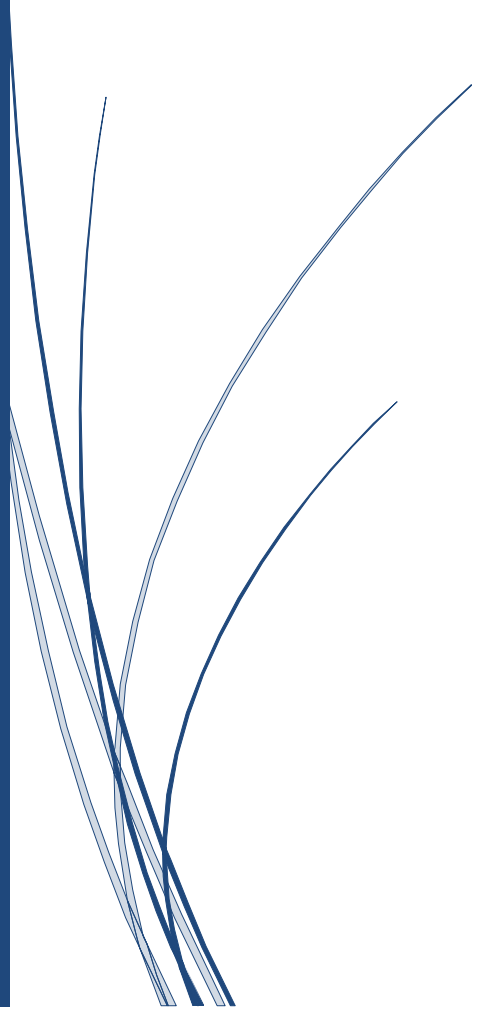
C.10 Ekuitas

Rp8.381.250.826

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp8.381.250.826 dan Rp8.588.220.425 . Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

12/31/2024

CALK LAPORAN OPERASIONAL



pendapatan PNBP Rp0

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Beban Pegawai Rp0

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Pada Tahun Anggaran 2024 tidak ada nilai pada Beban Pegawai dikarenakan adanya migrasi pada akun belanja pegawai ke DIPA Kantor Kementerian Agama Kota Palembang

Rincian Beban Pegawai TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	0	0	#DIV/0!
Beban Tunjangan-Tunjangan	0	0	#DIV/0!
Beban Honorarium dan Vakasi	0	0	-
Beban Lembur	-	-	#DIV/0!
Jumlah	**0**	**-**	**#DIV/0!**

Beban Persediaan Rp20.708.500

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp20.708.500 dan Rp19.165.222. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	20,708,500	19,165,222	8.05
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0	-
Beban Persediaan Suku Cadang	-	-	-
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	**20,708,500**	**19,165,222**	**8.05**

Beban Barang dan Jasa Rp1.062.968.549

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.062.968.549 dan Rp1.128.511.326 . Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Jasa untuk 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	512,217,439	471,912,246	8.54
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	800,000	500,000	60.00
Beban Honor Operasional Satker	38,880,000	53,648,000	(27.53)
Beban Bahan	115,265,631	135,612,085	(15.00)
Beban Honor Output Kegiatan	187,625,000	288,290,000	(34.92)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	17,825,000	17,479,000	1.98
Beban Langganan Air	13,541,458	5,033,077	169.05
Beban Langganan Listrik	97,535,100	118,010,839	(17.35)
Beban Langganan Telpon	10,721,871	2,795,284	283.57
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	16,070,400	24,029,674	(33.12)
Beban Jasa Profesi	33,600,000	4,695,000	615.65
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	18,886,650	6,506,121	-
Beban Barang Operasional-Penanganan COVID 19	0	0	-
Jumlah	**1,062,968,549**	**1,128,511,326**	**(5.81)**

Beban Pemeliharaan Rp189.661.233

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp189.661.233 dan Rp92.596.960. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharan untuk 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	174,675,183	83,796,960	108.45
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14,986,050	8,800,000	70.30
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	0	0	-
Jumlah	**189,661,233**	**92,596,960**	**178.75**

Beban Perjalanan Dinas Rp25.550.000

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp25.550.000 dan Rp45.420.000. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	16,100,000	16,420,000	(1.95)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	9,450,000	29,000,000	(67.41)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0	-
Jumlah	**25,550,000**	**45,420,000**	**-69.36**

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Rp0

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	-	-
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	-	-
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	-
Jumlah	**0**	**0**	**0.00**

Beban Bantuan Sosial Rp0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	2025	2024	% NAIK (TURUN)
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	0	-	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	0	-	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	0	-	-
Jumlah	**0**	**-**	**-**

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp360.912.949

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp360.912.949 dan Rp351.493.209. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2025 dan 2024

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	66,186,980	56,767,239	16.59
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	289,131,036	289,131,036	-
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	5,594,933	5,594,934	(0.00)
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	#DIV/0!
Beban Amortisasi Software	-	-	#DIV/0!
Jumlah Penyusutan	**360,912,949**	**351,493,209**	**2.68**
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	-
Beban Penyusutan aset lain-lain			-
Jumlah Amortisasi	**-**	**-**	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	**360,912,949**	**351,493,209**	2.68

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp0

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Beban Lain-lain Rp0

D.11. Beban Lain-lain

Jumlah Beban Lain-lain pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Surplus /Defisit dari Kegiatan Non Operasional Rp2.580.000

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp2.580.000 dan 0.

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2025 dan 2024

URAIAN	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan *)	0	0	#DIV/0!
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan *)	0	0	#DIV/0!
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	2,580,000	0	#DIV/0!
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	**2,580,000**	**0**	**#DIV/0!**

**) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)*

Pos Luar Biasa Rp0

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

12/31/2024

CALK LAPORAN EUKITAS

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp8.588.220.425

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp8.588.220.425 dan Rp8.914.807.596

Defisit LO

Rp(1.57.221.231)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp(1.657.221.231) dan Rp(1.637.186.717). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian Nilai Aset

Rp0

E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan Rp0

E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pecatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Jumlah	**0**

Selisih Revaluasi Aset Rp0

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Koreksi Gedung dan Bangunan	-
Koreksi Nilai Saldo Awal	-
Jumlah	**-**

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi Rp0

E.3.5 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp(88.366.112). Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Koreksi Lain-Lain Rp0

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	-
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Piutang	-
Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Hibah	-
Jumlah	**-**

Transaksi Antar Entitas Rp1.450.251.632

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.450.251.632 dan Rp1.398.965.658. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	-
Ditagihkan ke Entitas Lain	1,450,251,632
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	**1,450,251,632**

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025, DDEL sebesar Rp0 sedangkan DKEL sebesar Rp1.450.251.632.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp0

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp0-. dari total Rp0,- yang diterima sepanjang tahun 2025.

Ekuitas Akhir
Rp8.381.250.826

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp8.381.250.826 dan Rp8.588.220.425.

12/31/2024

INFORMASI KEUANGAN TERTENTU DAN INFORMASI PENTING LAINNYA

A. Informasi Keuangan Tertentu

1. Informasi Pagu dan Realisasi Anggaran sampai dengan 31 Desember 2025

a. Informasi Realisasi Belanja MTS Negeri 2 Palembang :

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi s.d 31 Desember 2025	Sisa Pagu s.d 31 Desember 2025
A	**B**	**C**	**D**
51	-	-	-
52	1.332.297.000	1.303.047.282	29.249.718
53	149.865.000	149.784.350	80.650
57	-	-	-
Total	**1.482.162.000**	**1.452.831.632**	**29.330.368**

Sampai dengan 31 Desember Tahun 2025, realisasi belanja pegawai/ barang/ modal/ bansos sebesar Rp. 1.452.831.632. serapan tersebut sudah mencapai target penyerapan sebesar 98.02 % atau sesuai dengan target pada Periode Tahunan 2025.

b. Informasi Pagu Minus Belanja Pegawai dan Rencana Mitigasi MTSN 2 Palembang

Jenis Belanja	Uraian	Pagu	Realisasi s.d 30 Sep	Rencana Realisasi Triwulan IV	Total Realisasi	Estimasi Sisa Pagu/ Pagu Minus
A	B	C	D	E	F (D + E)	G (C – F)
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	-	-	-	-	-
5115	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	-	-	-	-	-

Pada Satuan Kerja MTS Negeri 2 Palembang Tidak Terdapat Pagu Minus pada akun Belanja Pegawai disebabkan Tidak Adanya Pagu Anggaran 51 karena Terhitung Tahun Anggaran 2024 Pagu Anggaran 51 dialihkan ke Pagu Anggaran Pada Kantor Kementerian Agama Kota Palembang.

B. Penyajian Data Capaian Rincian Output Per Fungsi APBN

Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN Triwulan III Tahun 2025 pada MTS Negeri 2 Palembang antara lain sebagai berikut:

INFORMASI KINERJA MTS NEGERI 2 PALEMBANG TAHUN 2025

Kementerian/ Lembaga : MTS Negeri 2 Palembang
Fungsi : Pendidikan
Sub Fungsi : Pendidikan Dasar dan Menengah

Kode	Kegiatan	Belanja			Output				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DF 2129 QEK 006	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Th Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah Siswa MTS Penerima BOS	1.148.400.000	1.139.416.803	99.22	1.044	1044	Orang	100	Terlaksananya Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah Siswa MTs Penerima BOS Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Bulan Januari s.d Desember
WA 2135 EBA 994	Program Dukungan Manajemen Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam Layanan Dukungan Manajemen Internal Layanan Perkantoran	333.762.000	313.414.829	93.9	1	0	Layanan	100	Terlaksananya Layanan Dukungan Manajemen Internal Operasional dan Pemeliharaan Kantor Bulan Januari s.d Desember
	Sub Total	1.482.162.000	1.452.831.632	98.02					
	Penyesuaian (Revisi DIPA/ Pengembalian Belanja/ Dll)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	1.482.162.000	1.452.831.632	98.02					

Rincian Output Pada Satker MTS Negeri 2 Palembang sampai dengan 31 Desember 2025

C. Data Program Prioritas Nasional

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, Pada Satuan Kerja MTS Negeri 2 Palembang terdapat Alokasi Anggaran Untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional 04 – Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas dari 8 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari Prioritas Nasional 04 adalah sebagai berikut :

- Prioritas Nasional 04 – Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas.
  Pelaksanaannya diantaranya melalui 1 Program Prioritas, 1 Kegiatan Prioritas yang tersebar di 1 Satuan Kerja MTS Negeri 2 Palembang dengan pagu mencapai Rp. 1.148.400.000 dan realisasi sebesar Rp. 1.139.416.803 dengan rincian sebagai berikut:

Kementerian/ Lembaga : MTS Negeri 2 Palembang

Program/ Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output	Target	Capaian Output	%
Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Th/ Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah	1.148.400.000	1.139.416.803	99.22	Orang	1044	1044	100

- Dari Bulan Januari s. d 31 Desember Tahun Anggaran 2025 DIPA MTS Negeri 2 Palembang telah dilakukan revisi DIPA ke 7 Tanggal 19 Desember 2025 yang terdiri dari Revisi POK dan Revisi Halaman III DIPA;
- Terdapat Pergantian Kuasa Pengguna Anggaran Per Tanggal 21 Juli 2025 yang semula Dra. Nuraini Farida M.Si menjadi M. A. Fajar, S.Pd, M.Pd berdasarkan SK Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 4438/KW.06.1.3/KP.07.6/07/2025 Tanggal 17 Juli 2025.